

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN,
PENDIDIKAN DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S1) Pada
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

Chairati Fadliyah

NIM/BP:15060016/2015

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2019

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

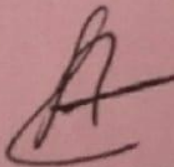
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN PENDIDIKAN
DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
INDONESIA

Nama : CHAIRATI FADLIYAH
NIM/TM : 15060016/2015
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Oktober 2019

Mengetahui

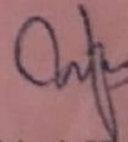
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Drs. Ali Anis, MS
NIP. 19591129 198602 1 001

Disetujui oleh:

Pembimbing



Mike Triani, SE., MM
NIP.19840129 200912 2002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

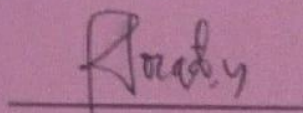
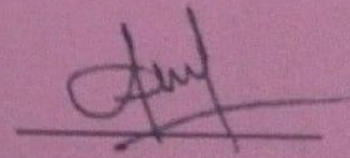
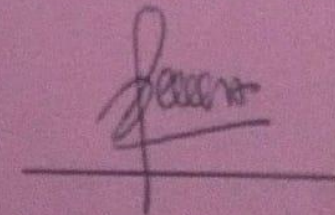
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN
DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KESEJHTEeraan MASYARAKAT DI
INDONESIA**

Nama : Chairati Fadliyah
NIM/TM : 15060016/2015
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Oktober 2019

Tim Penguji:

Nomor	Jabatan	Nama	
1.	Ketua	Melty Roza Adry, SE, ME	
2.	Anggota	Ariusni, SE, M. Si	
3.	Anggota	Dewi Zaini Putri, SE, MM	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Chairati Fadliyah
NIM / TahunMasuk : 15060016/2015
Tempat / TanggalLahir : Kudu / 17 November 1997
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Kudu, Kecamatan V Koto Timur Kabupaten
Padang Pariaman
No. HP / Telepon : 0823-8682-4942
JudulSkripsi : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor
Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur
Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di
Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis /skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis / skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis / skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karyatulis / skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karyatulis / skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di PerguruanTinggi.

Padang, Agustus 2019

Yang menyatakan,



Chairati Fadliyah

NIM. 15060016/2015

ABSTRAK

Chairati Fadliyah (15060016) : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan Dan Infrastruktur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. Dibawah Bimbingan Ibu Mike Triani S.E MM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pengaruh serta dampak dari tiap variabel ini akan menjadi landasan bagi pemerintah maupun lembaga terkait dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode *Panel Least Square* untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dilihat dari data 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2017 yang dikumpulkan melalui dokumentasi dari instansi pemerintah yang terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model (FEM)*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. (2) Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. (3) Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Disarankan pemerintah untuk lebih memperhatikan pembangunan manusia terhadap pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur di Indonesia. Disarankan pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dapat merubah atau memperluas cakupan penelitian, seperti jumlah sampel dan variabel yang digunakan sehingga dapat melengkapi dan menyempurnakan penelitian.

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT Rabb semesta alam karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA”**. Penulisan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir yang merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dari skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis untuk menjadi lebih baik dikemudian hari. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri penulis serta pihak-pihak terkait lainnya.

Selama berproses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Ali Anis, Ms selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ibu Melti Roza Adry, SE, ME selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Mike Triani SE,MM selaku pembimbing penulis yang telah membimbing, memberikan motivasi serta arahan dan dengar sabar mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan proses skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.
5. Teristimewa penulis persembahkan kepada ibu dan ayah tercinta serta udu, uni dan taci yang telah memberikan do'a dan motivasi yang tak pernah henti-hentinya, demi terealisasinya cita-cita penulis dalam menyelesaikan studi ini dengan cepat.
6. Rekan-rekan seperjuangan IE 15 dan seluruh pihak yang telah ikut memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih buat "Rahmad Hidayat" yang selalu menemani dan selalu ada saat di butuhkan haha, dan mendukung selama proses pengerjaan skripsi ini.
8. Teruntuk "Insyaallah Halal" (Riri Agustina Fratiwi, Krismay Putri, Sekar Lunggayu Kartika, Susilawati, Poeja Maura) terimakasih sudah mejadi teman yang udah kayak saudara selama 4 tahun yang memberi semangt penulis dalam pembuatan skripsi semoga kita sukses semuanya.
9. Terimakasih buat "Padang Squad" (Riri, Nadia, Desi, Aulia, Kak Ema, Kak suci, Yola) yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam penulis pembuatan skripsi.
10. Untuk "Efek Micin" (Neco, Febri, Dola, Ijung, Rozi, Adek, Hafif, Sindi, Riri, Kiki, Yola, Rada, Endang) terima kasih buat kalian yang udah jadi teman receh keberadaan kalian yang membuat semangat yang tinggi dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Untuk "Riri Agustina Fratiwi dan Krismay Putri" terimakasih buat kalian berdua yang selalu ada yang selalu memberikan dorongan buat mengerjakan skripsi ini dan selalu menolong dalam pembuatan skripsi dan urusan yang lain-lain selama di kampus.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal untuk segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti berupa pahala dan kemuliaan di sisi-Nya. Penulis sangat menyadari bahawa penulisan skripsi ini masih jauh dari unsur

kesempurnaan. Oleh sebab itu, segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan untuk masa yang akan datang. Penulis sangat berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Padang, November 2019

CHAIRATI FADLIYAH

Nim. 15060016

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR GRAFIK	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15

BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori	16
1. Kesejahteraan Masyarakat	16
2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan	18
3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	20
4. Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur.....	22
B. Penelitian Terdahulu	24
C. Kerangka Konseptual.....	25
D. Hipotesis	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	29
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
C. Jenis Data dan Sumber Data	29
D. Variabel Penelitian.....	30
E. Teknik Penelitian	30
F. Definisi Operasional	31
G. Teknik Analisis Data.....	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	40
1. Kondisi Geografis	40
B. Deskripsi Variabel Penelitian	41
1. Deskripsi Kesejahteraan Masyarakat	41
2. Deskripsi Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan	44
3. Deskripsi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	47
4. Deskripsi Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur	49
C. Analisis Induktif	52
1. Estimasi Model Regresi Panel	53
2. Uji Pemulihan Model Data Panel	55
3. Uji Regresi Panel	59
4. Koefisien Determinasi	61
5. Uji Asumsi Klasik	62
6. Uji Hipotesis	65
D. Pembahasan Hasil Penelitian	67
1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	68
2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	70
3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	72

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	75
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA	77
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	79
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kesejahteraan Penduduk Berdasarkan Pengeluaran Per Kapita	42
Tabel 4.2 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dalam Realisasi Belanja APBD	45
Tabel 4.3 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dalam Realisasi Belanja APBD	48
Tabel 4.4 Pengeluaran Pembiayaan Infrastruktur dalam Negeri pada Provinsi	51
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Uji Chow	56
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Uji Hausman.....	58
Tabel 4.7 Hasil Estimasi <i>Fixed Effect Model</i>	60
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi	62
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Multikolinearitas	63
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Heterokedastisitas.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Kesejahteraan Penduduk Berdasarkan Pengeluaran Per Kapita Tahun 2013-2017 di Indonesia.....	5
Gambar 1.2 Grafik Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dalam Realisasi Belanja APBD Tahun 2015-2017 di Indonesia.....	7
Gambar 1.3 Grafik Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dalam Realisasi Belanja APBD Tahun 2015-2017 di Indonesia.....	9
Gambarl 1.4 Grafik Pengeluaran Pembiayaan Infrastruktur Dalam Negeri Pada Provinsi di Indonesia	11
Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia.....	27

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 : Hasil Uji Normalitas Kesejahteraan Masyarakat	63
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara yang tengah giat – giatnya menggalakkan pembangunan nasional, menyadari akan pentingnya pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat serta mengejar ketertinggalannya dari negara – negara lain yang merupakan usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan.

Setiap manusia mendambakan kondisi kehidupan yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil. Masalah kesejahteraan menyangkut kapabilitas seseorang memenuhi kebutuhan dasar serta menaikkan standar kehidupannya. Kesejahteraan merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat dan bernegara.

Kesejahteraan selalu menjadi isu politik yang sensitive karena menyangkut kepentingan banyak orang. Kesejahteraan berdimensi luas dan kompleks mencakup seluruh aspek kehidupan dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Dinamisnya masalah kesejahteraan membutuhkan praktik kebijakan yang efektif dan efisien serta mekanisme yang tepat. Tidak jarang upaya pembangunan di suatu negara mengalami kesulitan bahkan kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Masalah kesejahteraan erat kaitannya dengan tingkat pendapatan. Pendapatan mencerminkan kemampuan daya beli seseorang yang akan berdampak pada kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan dan lainnya serta aktivitas investasi, dan menabung. Rendahnya pendapatan membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, mengembangkan diri, mengalami keteringgalan, dan keterpurukan ekonomi yang memicu lingkaran setan kemiskinan menyebabkan kondisi masyarakat suatu wilayah menjadi tidak sejahtera.

Kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah merupakan manifestasi yang diraih dari berbagai bidang mulai dari ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Dalam hal ini diperlukan sinergisitas yang baik antara seluruh pelaku pembangunan baik itu masyarakat sipil, sektor swasta, pemerintah dalam merencanakan, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya yang ada baik sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan modal uang yang menjadi faktor penting keberhasilan pembangunan.

Pembangunan merupakan salah satu tujuan suatu negara maupun wilayah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pembangunan meliputi berbagai aspek yaitu ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lainnya. Salah satu pembangunan yang penting adalah pembangunan manusia yang dapat diukur melalui Indeks Pembangunan manusia yang meliputi 3 komponen yaitu kesehatan berupa angka harapan hidup, pendidikan berupa

angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dan daya beli berupa pendapatan perkapita.

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat secara parsial melalui besaran permasalahan yang dapat diatasi namun pencapaian pembangunan manusia secara parsial sebenarnya sangat bervariasi dimana terdapat beberapa aspek pembangunan yang berhasil sedangkan beberapa aspek lainnya justru gagal. Untuk melakukan pembangunan manusia tersebut maka menjadi tugas pemerintah yang bertanggung jawab sebagai pelaksananya yang dilakukan melalui berbagai kebijakan, berupa kebijakan fiskal yang instrumennya mengarah pada pengalokasian dana atau anggaran pembangunan ke bidang yang berkaitan yaitu pengeluaran pemerintah (Intan:2016)

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meratanya distribusi pendapatan dan banyaknya penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan penduduk menyebabkan tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat diminimalisir dari daerah yang bersangkutan.

Statistik pendapatan nasional yang mengukur kesejahteraan manusia tidaklah sempurna, hal ini telah mendorong *United Nations Development Program* (UNDP) untuk mempublikasikan setiap tahunnya indikator kesejahteraan sosial untuk 175 negara. Indikator tersebut dikenal dengan *Human Development Index* (HDI) atau Indek Pembangunan Manusia (IPM). Indek pembangunan manusia merupakan perangkat yang digunakan untuk

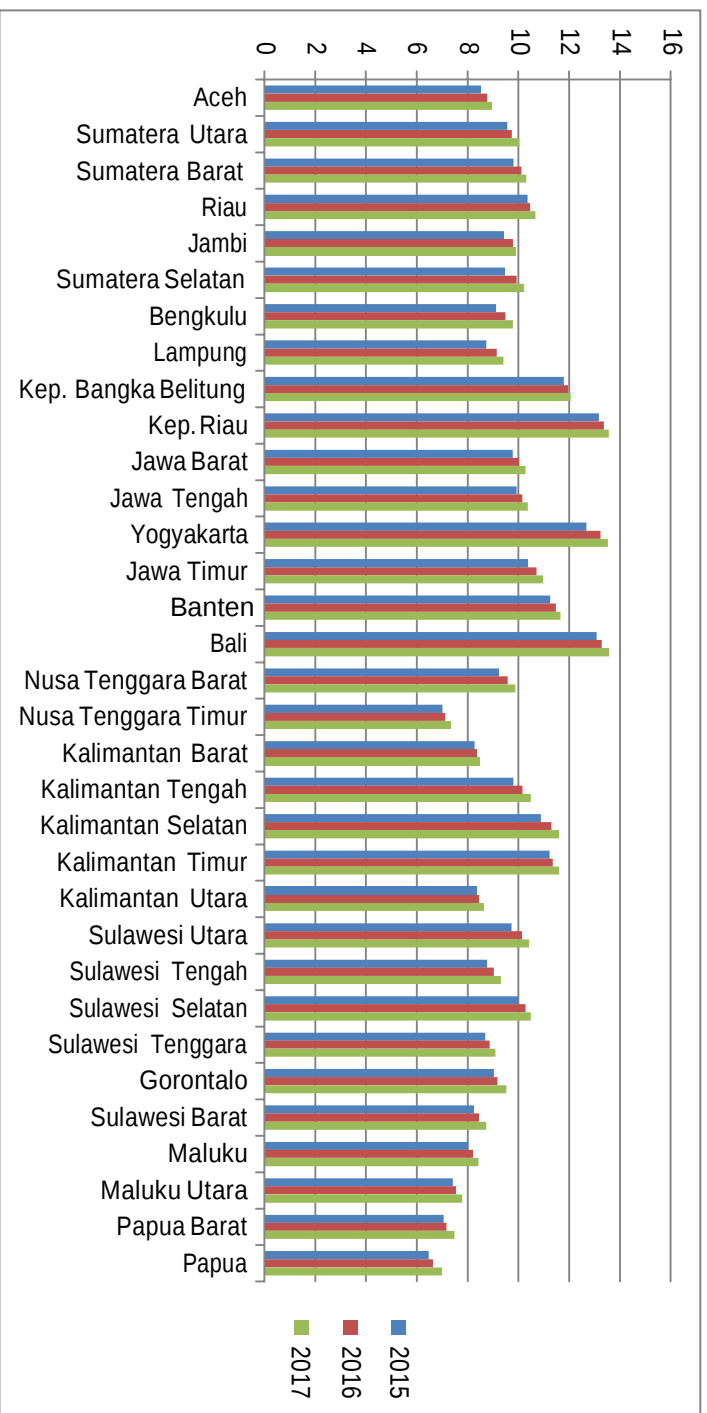
mengukur tingkat kesejahteraan antar negara ataupun antar daerah (Todaro,2009).

Setiap manusia mendambakan kondisi kehidupan yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal material dan dalam hal non material. Masalah kesejahteraan menyangkut kapabilitas seseorang memenuhi kebutuhan dasar serta menaikkan standar hidup kehidupannya. Kesejahteraan merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat dan negara.

Kesejahteraan selalu menjadi isu publik yang sensitive karena menyangkut kepentingan banyak orang. Kesejahteraan berdimensi luas dan kompleks mencakup seluruh aspek kehidupan dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Dinamisnya masalah kesejahteraan membutuhkan praktik kebijakan yang efektif dan efisien serta mekanisme yang tepat. Tidak jarang upaya pembangunan di suatu negara mengalami kesulitan bahkan kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1.1

Grafik Kesejahteraan Penduduk Berdasarkan Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/Orang) Tahun 2013-2017 di Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia 2018

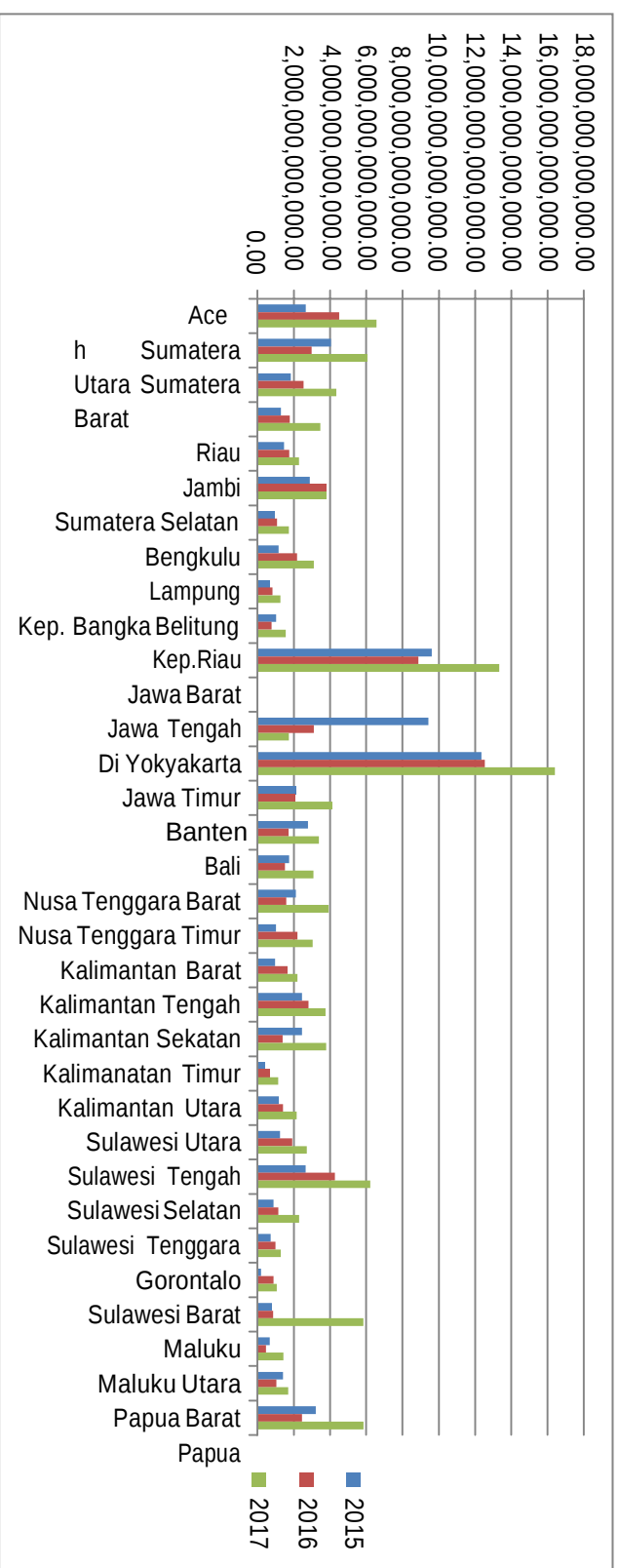
Berdasarkan Gambar 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan penduduk berdasarkan pengeluaran per kapita dalam satuan ribu/rupee pada Provinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun mengalami fluktuasi. Hal ini terlihat dari pengeluaran kesejahteraan penduduk pada tahun 2015 yang tertinggi terjadi di Provinsi Riau. Sedangkan yang terendah juga terjadi di daerah Papua. Pada tahun 2016 yang tertinggi juga terjadi di Provinsi Riau, sedangkan yang terendah juga terjadi pada Provinsi Papua. Dan pada tahun 2017 pengeluaran per kapita yang tertinggi juga terjadi di Provinsi Riau, yang terendah terjadi pada Provinsi Papua.

Dilihat dari penjelasan grafik di atas bahwa setiap tahunnya pengeluaran per kapita pada Provinsi Riau selalu memiliki nilai tertinggi dan Provinsi Papua selalu mengalami nilai terendah setiap tahunnya. Pengeluaran per kapita selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya walaupun dengan nilai kenaikan yang sedikit.

Pada indikator Kesejahteraan penduduk berdasarkan pengeluaran perkapita Sumatera Barat berada pada kategori menengah ke atas. Di kawasan Pulau Sumatera, Sumatera Barat berada di bawah Riau dan Kepulauan Riau berada pada kategori menengah atas. Fakta ini menunjukkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai akibat tidak fokusnya kebijakan pembangunan pada kesejahteraan manusia di Sumatera Barat, baik skala pembangunan daerah.

Gambar 1.2

Grafik Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dalam Realisasi Belanja APBD Tahun 2015-2017 di Indonesia (Miliar Rupiah)



Sumber : Kementerian keuangan 2018

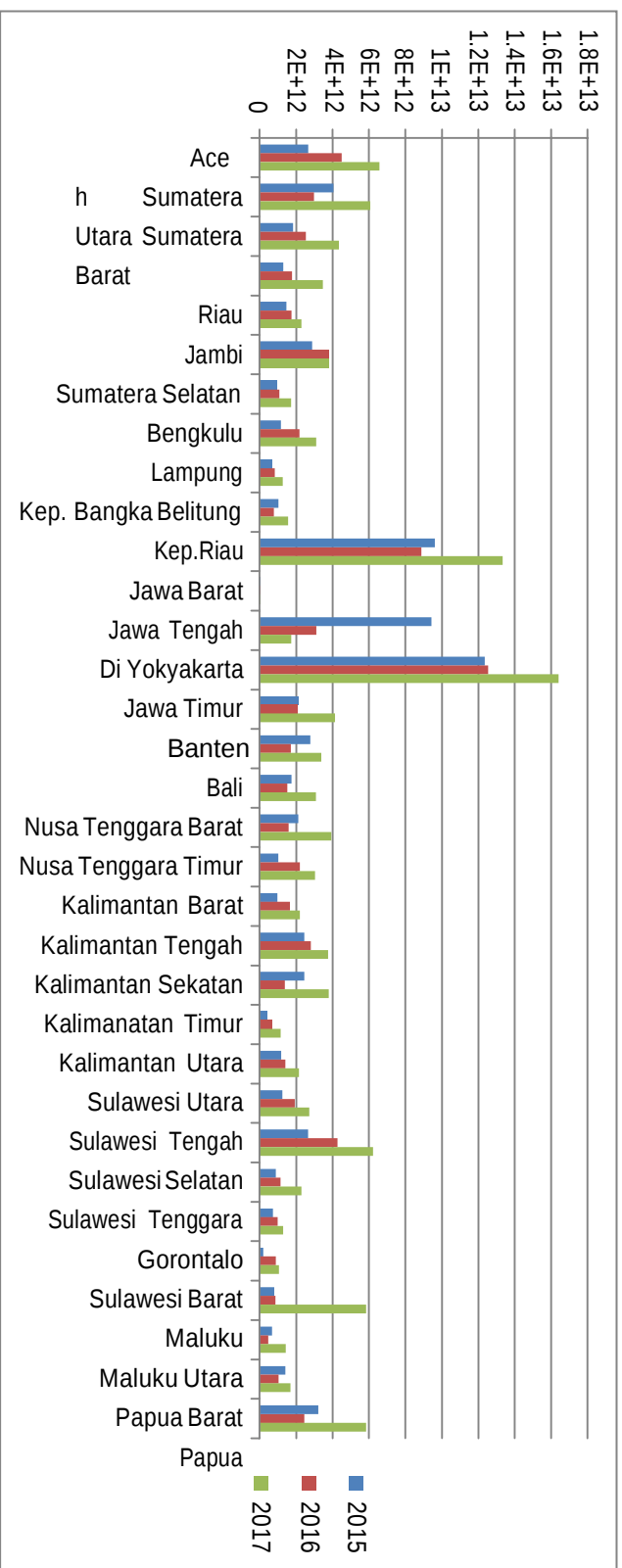
Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan mengalami peningkatan dan penurunan antar Provinsi yang ada di Indonesia. Pengeluaran pemerintah yang paling tinggi pada tahun 2015 terdapat pada Provinsi Jawa Timur dan Pengeluaran pemerintah yang paling rendah dalam bidang kesehatan terdapat di daerah Jawa Tengah. Sedangkan pada tahun 2016 pengeluaran kesehatan yang paling tinggi itu terjadi di Provinsi Jawa Timur dan yang terendah terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Dan pada tahun 2017 yang tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Timur sedangkan yang terendah terjadi di Provinsi Jawa Tengah.

Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dan sehat fisik, batin maupun jiwa yang membuat seseorang dapat melakukan kegiatannya dan menghasilkan produktivitas. Kesehatan memiliki keterkaitan erat satu sama lain dengan pembangunan.

Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dan sehat fisik, batin maupun jiwa yang membuat seseorang dapat melakukan kegiatannya dan menghasilkan produktivitas. Kesehatan memiliki keterkaitan erat satu sama lain dengan pembangunan. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan. Jadi kesehatan adalah hal yang fundamental untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan (Intan:2016).

Gambar 1.3

Grafik Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dalam Realisasi Belanja APBD Tahun 2015-2017 di Indonesia (Miliar Rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan 2018

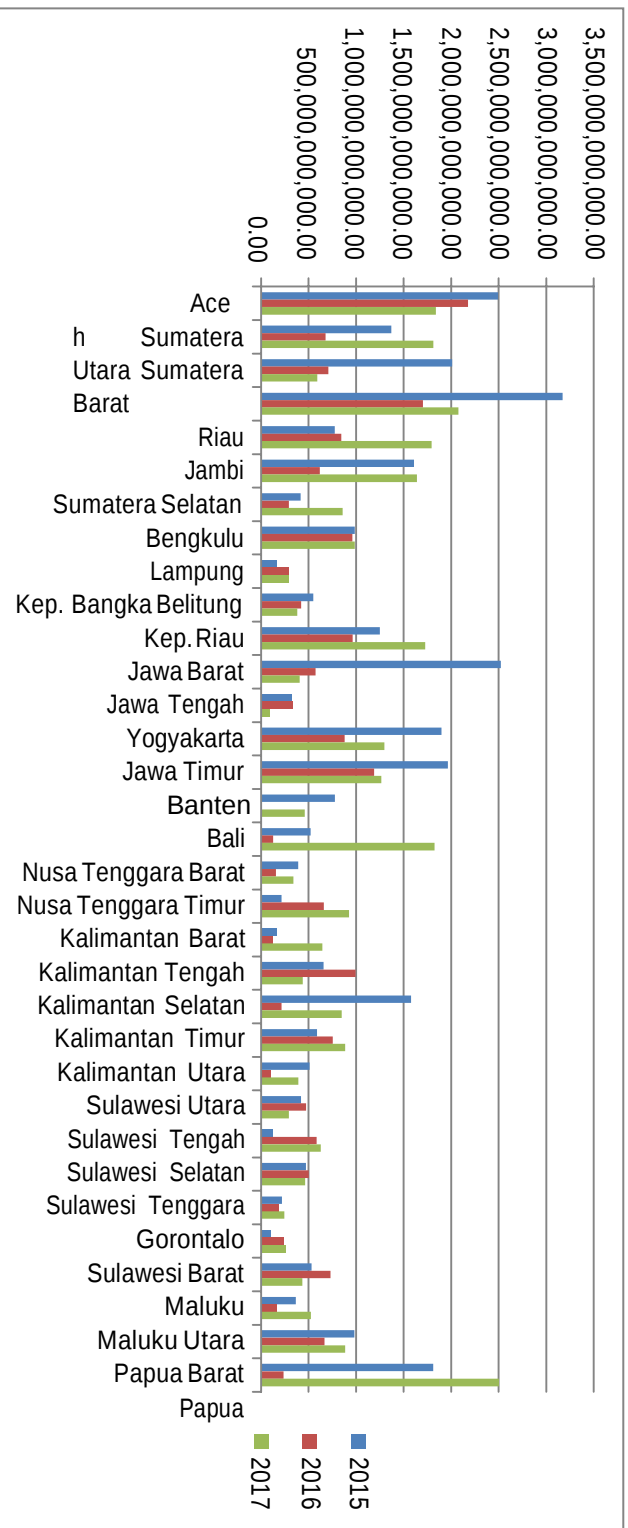
Berdasarkan gambar 1.3 menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan mengalami peningkatan dan penurunan antar Provinsi yang ada di Indonesia. Pengeluaran pemerintah yang paling tinggi pada tahun 2015 terdapat pada Provinsi Sumatera Utara dan Pengeluaran pemerintah yang paling rendah dalam bidang pendidikan terdapat di daerah Kalimantan Utara.

Sedangkan pada tahun 2016 pengeluaran kesehatan yang paling tinggi itu terjadi di Provinsi Jawa Timur dan yang terendah terjadi di Provinsi Kalimantan Utara. Dan pada tahun 2017 yang tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Timur sedangkan yang terendah terjadi di Provinsi Kalimantan Utara.

Hal ini terjadinya tergantung berapa banyak kab/kota yang ada di Provinsi tersebut semakin banyak jumlah kab/kota atau semakin banyak pengeluaran yang dilakukan pemerintah dan juga semakin pemerintah memperhatikan kondisi pendidikan di daerah tersebut.

Gambar 1.4

Grafik Pengeluaran Pembiayaan Infrastruktur Dalam Negeri Pada Provinsi di Indonesia (Miliar Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik 2018

Dari gambar 1.4 di atas di jelaskan bahwa pembiayaan infrastruktur yang tertinggi pada tahun 2015 terjadi di Provinsi Riau, dan yang terendah terjadi pada Provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 2016 dapat kita lihat bahwa yang tertinggi terjadi di Provinsi Aceh, sedangkan yang terendah terjadi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan pada tahun 2017 yang pembiayaan infrastruktur tertinggi terjadi di Provinsi Papua, sedangkan yang terendah terjadi di Provinsi Yogyakarta.

Dari penjelasan data di atas dapat kita lihat bahwa pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur tidak selalu mengalami peningkatan yang signifikan, malah pada tahun dan provinsi tertentu ada yang mengalami naik turun. Pada Provinsi yang mengalami naik turun itu akan membuat hasil laju pertumbuhan yang tidak bagus, atau masih kurang bagus ekonomi di Provinsi tersebut.

Dapat kita lihat bahwa setiap tahunnya pengeluaran pembiayaan infrastruktur Indonesia tidak selalu meningkat, sedangkan dari tahun ke tahun yang tertinggi itu selalu terjadi pada Provinsi yang berbeda-beda dan begitu pula yang terendah pembiayaan infrastruktur dari tahun ketahun itu terjadi pada Provinsi yang berbeda-beda juga.

Infrastruktur yang kurang memadai juga mempengaruhi daya tarik iklim investasi di Indonesia. Investor asing penuh kekhawatiran untuk berinvestasi di Indonesia, misalnya fasilitas manufaktur di Indonesia kalau pasokan listrik tidak pasti atau biaya transportasi sangat tinggi.

Kenyataannya Indonesia sering diganggu pemadaman listrik, meski negeri ini dinyatakan berlimpah sumber daya energi.

Sementara itu masalah logistik yang tidak efisien akan menghambat peluang para pengusaha untuk memperluas bisnis mereka. Infrastruktur fisik yang kualitasnya kurang baik dapat menyebabkan masalah yang lebih buruk di Indonesia.

Dalam konteks kompleks ini Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mencari terobosan yang sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia, misalnya anggaran pemerintah untuk membangun infrastruktur telah meningkat tajam sejak Joko Widodo memimpin negara ini.

Secara keseluruhan, keadaan infrastruktur Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga dapat dianggap kurang baik. Maka dari itu pemerintah menyediakan barang-barang keperluan publik yaitu fasilitas umum, bangunan, jalan, jembatan dan keperluan publik lainnya.

Berdasarkan latar belakang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor Infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur secara bersamaan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diterima selama perkuliahan.
2. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat sebagai salah satu sumber informasi.
3. Dapat berguna sebagai pedoman pengambilan kebijakan yaitu pemerintah di Indonesia.
4. Sebagai referensi bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian dengan topik atau bidang yang sama.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teoritis

1. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dalam ekonomi konvensional berfokus pada kesejahteraan material berdasarkan tingkat kesenangan dan kepuasan. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dianggap sebagai ukuran peningkatan kesejahteraan dengan mengakibatkan aspek spiritual dan moral. Seiring waktu, terjadi perubahan konsep dalam mendefinisikan kesejahteraan karena masalah kesejahteraan sangat kompleks sehingga diperlukan rumusan yang multidimensi baik bersifat fisik maupun non fisik.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Todaro dan Smith (2011:27) menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik seperti peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar, peningkatan tingkat pendapatan yang lebih baik, peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, serta memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Menurut Jhingan (2006:7) kesejahteraan masyarakat cenderung dilihat dengan perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi dipandang sebagai suatu

proses dimana pendapatan nasional riil per kapita naik diberbagai dengan penurunan kesenjangan pendapatan dan pemenuhan keinginan masyarakat secara keseluruhan.

Dapat diartikan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat baik secara jasmani dan rohani seperti pakaian, makanan, rumah tangga, kesehatan, dan pendidikan pada tingkat batas anggaran tertentu serta mempunyai kapabilitas untuk dapat meningkatkan standar dan kualitas hidup ke arah yang lebih baik.

Indikator tingkat kesejahteraan masyarakat terus dikembangkan mulai dari tingkat kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia (IPM), namun salah satu yang terpenting adalah pendapatan perkapita. Menurut Mankiw (2004:29) pendapatan perkapita merupakan ukuran terbaik yang diberikan oleh ahli makroekonomi untuk membandingkan taraf kehidupan masyarakat di berbagai negara, walaupun GDP yang besar tidak menjamin kebahagiaan seluruh penduduk suatu negara. dapat ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut:

Menurut Todaro (2011:273) secara lebih spesifik mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut:

$$W = f(Y, I, P) \dots \dots \dots (2.1)$$

Dimana W merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai fungsi dari pendapatan perkapita (Y), ketimpangan (I) dan kemiskinan (P).

Pendapatan mencerminkan kemampuan daya beli seseorang yang akan berdampak pada kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang,

pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan dan lainnya serta aktivitas investasi, dan menabung. Efek kenaikan pendapatan akan menggeser budget line sehingga akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kontribusi pendapatan masyarakat dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kesenangan dan kepuasan individu, dimana dengan pendapatan mereka dapat meningkatkan derajat kesehatan, dan menjalani hidup bahagia dalam masyarakat.

Jika pendapatan masyarakat tergolong tinggi berada di atas garis kemiskinan berarti masyarakat punya akses keuangan yang cukup dan banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan sehingga menjadi sejahtera. Sebaliknya, jika tingkat pendapatan suatu masyarakat rendah atau berada dibawah garis kemiskinan maka masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya menggambarkan diri, mengalami ketertinggalan, dan keterpurukan ekonomi yang memicu lingkaran setan kemiskinan menyebabkan kondisi masyarakat suatu wilayah menjadi tidak sejahtera.

2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan merupakan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk tujuan pelayanan kesehatan. Biaya tersebut digunakan dalam bentuk pembelanjaan barang, belanja rutin, belanja operasional dalam rangka menciptakan program dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Pemerintahan harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat

dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau dan berkualitas.

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Manusia tidak akan dapat beraktivitas dengan baik jika mengalami gangguan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Tidak hanya bagi usia dewasa namun juga anak-anak, oleh karena itu sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus direncanakan sedemikian rupa oleh pemerintah.

Rendahnya tingkat kesehatan mengakibatkan rendahnya produktifitas karena banyaknya hari kerja yang hilang karena sakit. Produktivitas yang rendah akan mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan yang diterima oleh seorang individu. Oleh karena itu, tingkat kesehatan yang rendah sangat rentan terhadap penurunan dari indeks pembangunan manusia.

Mardison (2002:78) menyatakan peranan pemerintah dalam pembangunan kesehatan pada dasarnya bertanggung jawab kepada perbaikan kesehatan masyarakat dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Menyediakan pelayanan kesehatan dapat didistribusikan kepada masyarakat.
- b. Mengatur, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesehatan.
- c. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan dan membiayai usaha-usaha kesehatan tanpa melupakan fungsi sosial.

- d. Pengaturan asset-aset pemerintah yang berhubungan dengan tugas-tugas rutin administrasi pemerintah dan usaha-usaha pembangunan sektor kesehatan.
- e. Pengawasan pelaksanaan tugas-tugas rutin administrasi pemerintah dan usaha-usaha pembangunan di sektor kesehatan yang berada dibawah kebijakan umum yang digariskan presiden dan peraturan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan maka diperlukan dana, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat, hal tersebut dikarenakan kesehatan turut serta membantu peningkatan pembangunan manusia, karena manusia yang sehat akan jauh lebih baik dari pada manusia yang kurang sehat. Kesehatan yang baik akan berpengaruh pada perubahan yang baik. Sebaliknya kesehatan yang baik akan berpengaruh pada perubahan yang baik, kesehatan yang buruk atau kurang baik akan berakibat pada penyebaran keadaan yang kurang baik juga tentunya, karena tanpa kesehatan masyarakat tidak akan memiliki semangat serta produktivitas.

3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan adalah anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Pemerintah berkewajiban menciptakan system pendidikan yang terpadu dan terintegrasi dengan baik kemudian terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat. Ketersediaan layanan pendidikan yang baik membutuhkan campur tangan pemerintah karena pendidikan merupakan barang publik. Dengan adanya

pembangunan sektor pendidikan oleh pemerintah diharapkan tercipta masyarakat yang cerdas dan produktif dengan ditunjang oleh kualitas dan kuantitas sarana dan prasarannya. Meningkatnya mutu pendidikan membuat produktifitas penduduk meningkat yang akan mendorong kenaikan pendapatan perkapita di suatu daerah dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat karena tarif hidupnya meningkat.

Pendidikan merupakan ilmu pengetahuan, keterampilan, pelatihan maupun bimbingan yang diberikan baik kepada individu maupun kelompok agar menjadi sosok yang dapat menghasilkan suatu kreativitas maupun inovasi yang bermanfaat dan berguna. Pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan, Todaro (2008:434) juga menyebutkan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, sehingga merupakan hal fundamental untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan (Intan:2016)

Suatu daerah baik itu negara, Provinsi sampai ke Kabupaten/Kota harus mampu meningkatkan investasi di bidang kesehatan dan pendidikan untuk mencapai pembangunan, untuk mendukung tercapainya tujuan dari pemerintah tersebut maka dapat di lihat dari seberapa besar pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan yang mana proporsi dari pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan menurut UU 1945 Pasal 31 ayat 2, 3, dan 4 menyatakan bahwa:

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan , pemerintah mewajibkan setiap warga untuk mengikuti pendidikan dasar dan wajib

membiayainya serta pemerintah minimal mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD, melalui instrumen kebijakan yaitu fiskal, pemerintah mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan.

4. Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur

Infrastruktur menurut Kamus Besar Ekonomi adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama dalam terselenggaranya proses usaha, pembangunan proyek dan sebagainya, seperti jalan raya, rel kereta api, rumah sakit, gedung sekolah dan sebagainya. Menurut Mankiw (2015:361) Infrastruktur dibentuk dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah yang meliputi: jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan lainnya.

Infrastruktur merupakan sarana yang disediakan demi terlaksananya suatu pembangunan. Sarana tersebut diantaranya transportasi, komunikasi, perhubungan, listrik dan lainnya. Pembangunan manusia bergantung pada ketersediaan infrastruktur dalam menunjang investasi pada sumberdaya manusia yang tidak lain adalah untuk memperbaiki serta pembangunan kualitas modal manusia itu sendiri. Ada tiga alasan utama mengapa infrastruktur penting dalam sebuah integrasi ekonomi. Alasan pertama adalah ketersediaan infrastruktur yang baru merupakan mesin utama pembangunan ekonomi. Kedua, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktivitas perdagangan dan investasi. Alasan ketiga

adalah perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar Negara.

Peran infrastruktur cukup signifikan dalam mengkselarasi pembangunan ekonomi secara umum. Beberapa terminologi infrastruktur menjangkau hal yang lebih luas, misalnya The World Bank (1994) memberikan batasan infrastruktur terbagi atas infrastruktur ekonomi berupa *public utilities* (tenaga listrik, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), *public work* (jalan, bendungan, jembatan, kanal, irigasi dan drainase), dan sektor transportasi (rel kereta api, terminal bus, pelabuhan dan bandar udara), infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi serta infrastruktur administrasi berupa penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi (Intan:2016).

Infrastruktur merupakan fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai pelayanan publik, agar dapat menunjang dan mendorong aktivitas ekonomi atau sosial masyarakat infrastruktur memiliki sifat sebagai barang publik. Barang publik mempunyai ciri utama dari sisi penggunaannya (konsumsi barang publik) yaitu *non-rivalry* dan *non-excludable*. *Rivalry* merupakan sifat rivalitas atau persaingan dalam mengkonsumsi atau menggunakan suatu barang. Artinya jika suatu barang digunakan oleh seseorang maka barang tersebut tidak dapat digunakan oleh orang lain. *Excludable* merupakan sifat mengeluarkan atau menghalangi seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang. Artinya keinginan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang dapat dihalangi dengan pihak lain (Pemasok).

B. Penelitian Terdahul

Penelitian yang dilakukan oleh Indra dkk (2019) menunjukkan bahwa dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui anggaran pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia. data yang di gunakan adalah anggaran pendidikan dan kesehatan, dan indeks pembangunan manusia (data time series 15Tahun terhitung dari Tahun 2007-2016). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial variabel pendidikan mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara, sama halnya dengan variabel yang juga mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Sulawesi Utara, dan secara bersama variabel pendidikan dan kesehatan mampu memberikan pengaruh yang signifikan dengan peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2016) Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pendidikan dan infrastuktur di Provinsi Aceh setiap tahunnya selalu meningkat, ini menandakan bahwa pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang tentunya akan berpengaruh pada pembangunan nasional dan berdampak positif bagi produktivitas maupun pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tetapi faktanya melalui data yang diperoleh dari PECCAP (*Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program*) dan Dinas Keuangan Aceh, kenaikan pengeluaran pemerintah Aceh

pada ketiga sektor tersebut belum sesuai ataupun seimbang dengan hasil yang diperoleh yaitu aspek dalam melihat keberhasilan pengeluaran tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Suparno (2014) Substruktur pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur memberikan pengaruh secara langsung tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan memberikan pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, sedangkan pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Substruktur kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan serta pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh secara langsung dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kalimantan Timur. pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) akan tetapi hanya pengeluaran pemerintah sektor kesehatan yang memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kalimantan Timur, sedangkan pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan IPM di Kalimantan Timur.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan menggunakan dan menentukan persepsi keterkaitan antara variabel-variabel yang

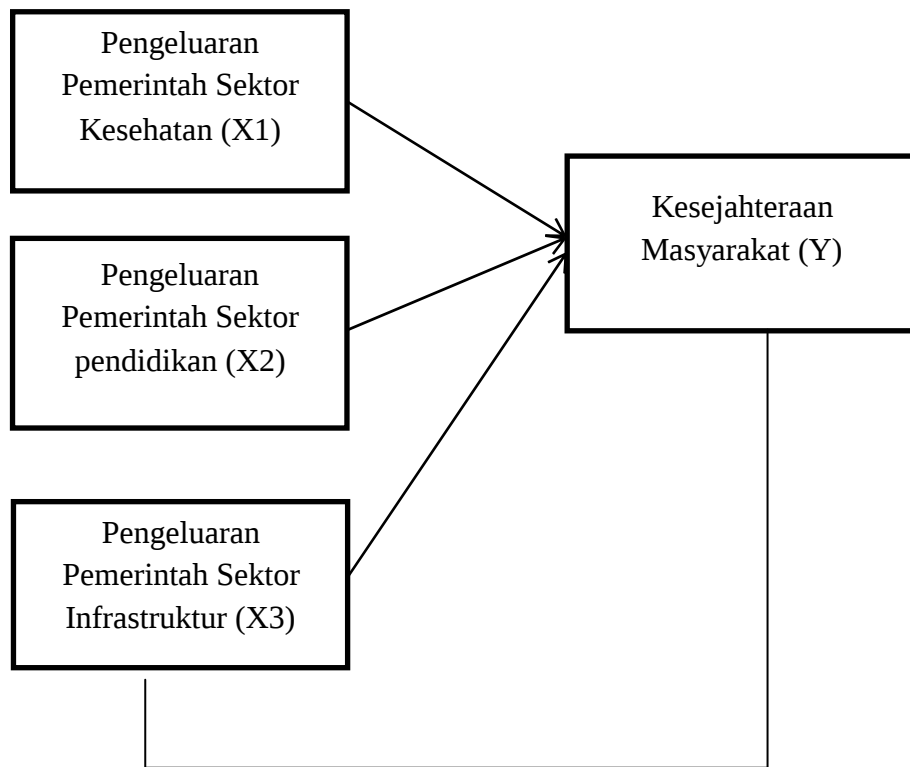
akan diteliti berdasarkan permasalahan maupun antara variabel yang diteliti berpijak dari kajian teori yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

Kesejahteraan selalu menjadi isu politik yang sensitive karena menyangkut kepentingan banyak orang. Kesejahteraan berdimensi luas dan kompleks mencakup seluruh aspek kehidupan dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Dinamisnya masalah kesejahteraan membutuhkan praktik kebijakan yang efektif dan efisien serta mekanisme yang tepat. Tidak jarang upaya pembangunan di suatu negara mengalami kesulitan bahkan kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan akan berpengaruh terhadap Kesejahteraan masyarakat, dimana apabila tingkat kesehatan bagus, maka masyarakat bias menghasilkan suatu produktif yang akan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia yang akan berimplikasi terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan begitu juga pada ekonomi masyarakat sendiri, dimana terpenuhinya kebutuhan ekonomi dari meningkatnya pendapatan masyarakat itu sendiri yang merupakan dampak dari berkualitasnya sumber daya manusia.

Berdasarkan variable yang telah di deskripsikan di atas dapat disimpulkan sementara bahwa variable pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh terhadap Kesejahteraan masyarakat.

Untuk lebih jelas bagaimana hubungan antara variable-variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan pada skema berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang disusun dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Hipotesis Statistik : $H_0 : \beta_1 = 0$

: $H_a : \beta_1 \neq 0$

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Hipotesis Statistik : $H_0 : \beta_2 = 0$

: $H_a : \beta_2 \neq 0$

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Hipotesis Statistik : $H_0 : \beta_3 = 0$

: $H_a : \beta_3 \neq 0$

4. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.

Hipotesis Statistik : $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$

$H_a : \text{salah satu koefisien} \neq 0$

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis Regresi Model Panel menggunakan *Fixed Effect Model* dan pembahasan terhadap hasil penelitian antara variabel bebas terhadap variabel terikat seperti yang telah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Artinya, semakin meningkat pengeluaran pemerintah sektor kesehatan maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat begitu juga sebaliknya.
2. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Artinya, semakin meningkat pengeluaran pemerintah sektor kesehatan maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat begitu juga sebaliknya.
3. Pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Artinya, semakin meningkat pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat begitu juga sebaliknya.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan

pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat maka ditemukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan pemerintah untuk lebih memperhatikan pembangunan manusia terhadap pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur di Indonesia.
2. Disarankan pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan di Indonesia.
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dapat merubah atau memperluas cakupan penelitian, seperti jumlah sampel dan variabel yang digunakan sehingga dapat melengkapi dan menyempurnakan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, Meylina. 2013. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *IPM Berdasarkan Pengeluaran Per Kapita Di Indonesia 2015*. Padang: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *IPM Berdasarkan Pengeluaran Per Kapita Di Indonesia 2016*. Padang: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *IPM Berdasarkan Pengeluaran Per Kapita Di Indonesia 2017*. Padang: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Pengeluaran Pembiayaan Infrastruktur Dalam Negeri Pada Provinsi di Indonesia 2015*. Padang: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Pengeluaran Pembiayaan Infrastruktur Dalam Negeri Pada Provinsi di Indonesia 2016*. Padang: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Pengeluaran Pembiayaan Infrastruktur Dalam Negeri Pada Provinsi di Indonesia 2017*. Padang: BPS.
- Baeti, Nur. 2013. *Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Gujarati; Damodar, dan Dawn C, Porter. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati; Damodar, dan Dawn C, Porter. 2006. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Imelda Indra. 2019. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Mankiw. N Gregory. 2015. *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Mirza, Sulistio D. 2012. *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Kadir, Mahulauw, dkk. 2014. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, Serta Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Maluku*. Brawijaya: Universitas Brawijaya.